

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DALAM PROGRAM  
SERTIPIKASI MASSAL SWADAYA  
( Studi di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk  
Memperoleh Sebutan Sarjana Sains Terapan  
Pada Program Diploma IV Pertanian  
Jurusan Perpetaan



OLEH :

**NINIK INDRAWATI**

**NIM. 06152249**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2010**

## INTISARI

Skripsi dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Solusi Keikutsertaan Petani dalam Program Sertifikasi Massal Swadaya (Studi di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah) mempunyai 2 (dua) tujuan dalam penelitiannya. Pertama, untuk mengetahui konsepsi pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo pada program Sertifikasi Massal Swadaya di Desa Jombang Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo. Kedua, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat pada program Sertifikasi Massal Swadaya di Desa Jombang Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo serta untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jombang Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo dengan pertimbangan bahwa di daerah tersebut pada tahun 2008 menjadi obyek lokasi dalam program Sertifikasi Massal Swadaya. Teknik menjangkau informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara *purposive sampling* (penarikan sampel bertujuan). Jenis dan sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dengan menguraikan hasil wawancara dan dilakukan analisis yang mendalam terhadap dokumen yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa konsepsi pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan. Bentuk partisipasi masyarakat terhadap adanya kegiatan pemberdayaan ini dapat dilihat antara sebelum dan sesudah dilakukan sosialisasi dan penyuluhan. Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tersebut tidak lepas dari adanya kendala/hambatan. Akan tetapi oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan ini tetap mengupayakan untuk bisa mengatasi hambatan yang ditimbulkan. Hambatan dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo yaitu dalam hal anggaran, DIPA terlalu kecil. Upaya untuk mengatasinya yaitu dengan melakukan koordinasi/kerjasama dengan pihak Desa Jombang dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan khususnya menyangkut biaya. Hambatan dari pihak pamong Desa Jombang dan Warga Desa Jombang menyangkut hal kehadiran dalam penyuluhan. Upaya untuk mengatasinya yaitu dengan memberikan brosur /diwakilkan kepada saudara/keluarga bagi warga yang tinggal di luar kota/wilayah Kecamatan Ngombol.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Istilah.....	6
D. Batasan Penelitian .....	9
E. Kebaruan (Novelty).....	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Tinjauan Pustaka.....	14
1. Pemberdayaan Masyarakat .....	14
2. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat .....	22
3. Kemiskinan Petani.....	23
4. Pendaftaran Tanah .....	30
5. Keikutsertaan/Partisipasi.....	37
B. Kerangka Pemikiran.....	40

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Penetapan Informan .....	44
D. Jenis dan Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Sistematika Penulisan .....	48

### BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH

A. Keadaan Wilayah Kabupaten Purworejo .....	50
1. Letak, Luas dan Batas Administrasi.....	50
2. Penggunaan Tanah.....	52
3. Kependudukan.....	53
4. Pendidikan .....	55
B. Keadaan wilayah Kecamatan Ngombol .....	56
1. Letak, Luas dan Batas Administrasi.....	56
2. Penggunaan Tanah.....	58
3. Kependudukan.....	60
4. Pendidikan.....	63
C. Keadaan Wilayah Desa Jombang .....	64
1. Letak, Luas dan Batas Administrasi.....	64
2. Penggunaan Tanah.....	65
3. Kependudukan.....	66
4. Pendidikan.....	67
5. Mata Pencaharian/Profesi.....	68
D. Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo.....	69
1. Keadaan Umum Kantah Kabupaten Purworejo.....	69
2. Profil Sumber Daya Manusia.....	73
3. Penguatan Hak-Hak Atas Tanah .....	77

## BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsepsi Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo.....	82
1. Sosialisasi.....	82
2. Penyuluhan.....	83
3. Pembinaan.....	91
B. Program Sertifikasi Massal Swadaya Di Desa Jombang Kecamatan Ngombol .....	91
C. Partisipasi Masyarakat.....	102
1. Pihak Kecamatan Ngombol.....	103
2. Pihak Pamong Desa Jombang.....	104
3. Pihak Warga Desa Jombang.....	106
D. Hambatan dan Upaya penyelesaian.....	109
1. Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo.....	109
2. Kantor Kecamatan Ngombol.....	112
3. Kantor Desa Jombang.....	112
4. Warga Desa Jombang.....	113

## BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan .....	114
B. Saran .....	115

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara agraris, yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap terpenting dari keseluruhan pembangunan ekonomi, apalagi semenjak sektor pertanian menjadi penyelamat perekonomian nasional karena pertumbuhannya meningkat. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertanian di Indonesia yaitu :

1. potensi sumber dayanya yang besar dan beragam;
2. pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar;
3. besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian;
4. menjadi basis pertumbuhan di pedesaan.

(Wayan Suarja, 2009, *Pemberdayaan Masyarakat Petani*,  
[http://www.fb.brawijaya.ac.id.Academic/pdf/13-7 makalah.pdf](http://www.fb.brawijaya.ac.id.Academic/pdf/13-7%20makalah.pdf))

Perkembangan zaman seperti saat ini menuntut para pemilik tanah khususnya petani untuk mensertipikatkan tanahnya. Tanah yang tidak bersertipikat bisa saja diserobot oleh pihak lain yang meng-*klaim* bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Bahkan yang kerap

menjadi masalah adalah bahwa kedua belah pihak yang meng-*klaim* memiliki tanah tersebut sama-sama memiliki sertipikat tanah yang kedua-duanya sah menurut hukum. Ini yang sering menjadi polemik sistem pertanahan kita. Mengingat pentingnya sertipikat sebagai alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum dalam hal pembuktian hak atas tanah, maka masyarakat berupaya untuk dapat mensertipikatkan tanah yang dimilikinya.

Sementara itu, dalam rangka mensertipikatkan tanahnya masyarakat mempunyai keterbatasan kemampuan menyangkut faktor ekonomi yaitu dalam hal pembiayaan. Karena sebagian besar dari mereka adalah petani miskin yang memiliki lahan pertanian yang sempit dan sebagai petani penggarap. Dari hasil tanah pertanian tersebut petani tidak bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya dengan layak sehingga petani keberatan untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain selain kebutuhan pokok.

Sertipikat bagi petani bukanlah suatu prioritas yang harus segera dipenuhi. Selain itu petani tidak tahu ataupun tidak menyadari bahwa sertipikat adalah satu-satunya alat bukti hak atas tanah yang memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap kehidupannya. Hal ini dikarenakan kondisi ketidakberdayaan masyarakat khususnya petani di bidang pertanahan. Ketidakberdayaan ini salah satunya disebabkan karena kurangnya informasi dan pemahaman terhadap arti pentingnya sertipikat tanah.

Oleh karenanya diperlukan suatu bentuk kegiatan pemberdayaan agar petani bisa berdaya serta sadar akan arti pentingnya sertipikat sehingga mau dan mempunyai keinginan untuk mensertipikatkan tanah yang dimilikinya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. (Evy Juliantini, 2009, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan*, <http://www.pemberdayaan.com>).

Salah satu tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo adalah melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan oleh Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dari seksi tersebut dibagi menjadi 2 sub seksi yaitu sub seksi pengendalian pertanahan dan sub seksi pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo mempunyai suatu konsep pemberdayaan agar masyarakat khususnya petani dapat berpartisipasi dalam kegiatan pensertipikatan tanah.

Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo mengeluarkan kebijakan mengenai kegiatan



pensertipikatan tanah terhadap masyarakat golongan ekonomi menengah dan terutama bagi masyarakat tidak mampu/miskin yang berupa Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), Proyek daerah (PRODA), Land Management Policy Development Project (LMPDP), Sertifikasi Masal Swadaya (SMS). Dimana Kebijakan-kebijakan tersebut di lakukan dengan tujuan untuk membantu masyarakat golongan ekonomi menengah dan terutama masyarakat tidak mampu/miskin di dalam mensertipikatkan tanahnya dengan biaya yang relatif lebih murah dan terjangkau jika dibandingkan dengan pensertipikatan tanah secara rutin.

Menurut Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Pada tahun 2008 di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo telah dilaksanakan program Sertifikasi Massal Swadaya (SMS). Program SMS di Kecamatan Ngombol ini berjalan lancar dan sukses. Hal ini terbukti dengan tercapainya target sertifikasi tanah dan banyaknya jumlah peserta SMS, tetapi peserta SMS ini belum sesuai dengan sasaran yang diharapkan yaitu masih sedikit petani miskin yang ikut dalam program SMS ini. Selain itu, antusiasme masyarakat terhadap sertipikat sebagai produk akhir dari kegiatan ini terlihat ketika kegiatan SMS telah selesai maka masyarakat dengan segera mengambil sertipikat tersebut ke Kantor Pertanahan setempat. Keberhasilan program SMS ini tak lain dikarenakan adanya suatu bentuk kegiatan

pemberdayaan masyarakat. Peran Kantor Pertanahan dalam hal ini sangatlah besar sehingga petani bersedia dan mau ikutserta dalam program SMS ini.

Alasan lain pemilihan program SMS di Kecamatan Ngombol ini dikarenakan sebelumnya memang belum pernah diusulkan sebagai obyek/lokasi dalam PRONA maupun PRODA. Program adjudikasi pernah ada sebelumnya, akan tetapi tidak merata di semua desa di Kecamatan Ngombol. Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo memberikan alternatif lain bagi masyarakat untuk tetap dapat mensertipikatkan tanahnya melalui program SMS. Mengingat SMS adalah program yang pelaksanaannya murni dibiayai sendiri oleh masyarakat (peserta), maka Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo mempunyai suatu konsep pemberdayaan masyarakat khususnya bagi petani agar mereka dapat berdaya dan berpartisipasi dalam program SMS ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DALAM PROGRAM SERTIPIKASI MASSAL SWADAYA (Studi di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka timbul suatu pertanyaan:

1. Bagaimana konsepsi pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo pada Program Sertifikasi Masal Swadaya di Desa Jombang Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat pada program Sertifikasi Massal Swadaya di Desa Jombang Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?

## **C. Batasan Istilah**

Sehubungan dengan luasnya istilah dalam penelitian ini, maka perlu adanya batasan istilah agar tercapai suatu pemikiran yang sama antara peneliti dan semua pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun batasan istilah yang dimaksud adalah sebagaimana berikut ini.

1. Pemberdayaan menurut Mochtar Masoed (dalam Hendarto, 2008:38) adalah upaya untuk memberi daya atau kekuatan kepada masyarakat.
2. Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian

secara golongan dan pengaruh-pengaruh satu sama lain. ( Hassan Sadhily, 1989:47). Dalam hal ini adalah masyarakat yang tinggal di Desa Jombang Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo.

3. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. (Evy Juliantini, 2009, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan*, <http://www.pemberdayaan.com>).
4. Pemberdayaan masyarakat bersifat tematik atau bertujuan, dalam arti keikutsertaan petani pada program SMS.
5. Konsepsi adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.
6. Partisipasi menurut The Liang Gie (dalam Herman Suherman, 2008:40) adalah ikut ambil bagian atau turut serta dalam suatu aktivitas atau kegiatan.
7. Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam.
8. Petani gurem adalah petani kecil yang memiliki tanah pertanian kurang dari 0,25 hektar. Menurut Sajogyo (2006) Petani (*Peasants*) artinya petani gurem adalah petani yang mengusahakan lahan lebih kecil dari 0,5 Ha.
9. Pendaftaran Tanah menurut Pasal 1 butir 1 PP 24 Tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus

menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

10. Pendaftaran tanah sporadik menurut Pasal 1 butir 11 PP 24 Tahun 1997 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

11. Sertipikat menurut Pasal 1 butir 20 adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

12. Sertifikasi Massal Swadaya adalah salah satu bentuk kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik, oleh Suharno dan Patrick Adly A. Ekel (dalam Supriadi, 2007:12) dirumuskan bahwa SMS adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau lebih objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah atau bagian wilayah desa/kelurahan yang

dilaksanakan secara massal dengan biaya dibebankan kepada peserta.

#### **D. Batasan Penelitian**

Mengingat penetapan lokasi SMS di Kecamatan Ngombol ada 11 Desa, maka untuk membatasi tingkat kedalaman dan luasan cakupan penelitian ini, maka perlu dilakukan batasan penelitian dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Jombang Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo. Pemilihan Desa Jombang didasarkan atas banyaknya peserta yang ikutserta dalam program SMS yang sebagian besar dari mereka adalah petani.

Petani yang dimaksud disini petani gurem yaitu petani kecil yang memiliki tanah pertanian kurang dari 0,5 hektar. Kemiskinan petani dalam hal ini yaitu kemiskinan menurut kriteria yang ditetapkan oleh BPS. Hal ini dikarenakan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam menentukan daerah miskin merujuk pada data kemiskinan dari BPS.

## E. Kebaruan (Novelty)

TABEL 1.

### PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU DENGAN SAAT INI

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan
1.	Supriadi (2007)	Penyelesaian Sertifikasi Massal Swadaya di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali Tahun 2005	Diskriptif Kualitatif	1. Pelaksanaan SMS sudah sesuai dengan PMNA/KBPN No.3 tahun 1997 sebagai ketentuan pelaksanaan PP 24 Tahun 1997. 2. Kebijakan yang diambil dalam penyelesaian SMS dilakukan koordinasi dengan desa serta peserta SMS dengan penyesuaian keadaan di lapangan.
2.	Hendarto (2008)	Peranan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.	Deskriptif Kualitatif	Program Kerja Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka asistensi terdiri dari: penyuluhan kegiatan SMS, pemberkasan kegiatan SMS, sosialisasi reforma agraria, penyuluhan rutin pertanahan pada tiap kecamatan dan pembentukan POKMASEDARTIBNAH serta penyuluhan dan pemberkasan pada kegiatan UKM. Program kerja dalam fasilitasi rangka penguatan penguasaan tanah terdiri dari: Sertifikasi Massal Swadaya (SMS) dan UKM. Program kerja dalam inventarisasi potensi belum berjalan disebabkan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat sedang sibuk dalam rangka penyelesaian kegiatan SMS.

3.	Aristiono Nigroho (2008)	Peran Kantor Pertanahan dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin (Studi di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah)	Kualitatif Rasionalistik	Belum teratasinya kendala pelaksanaan PPAN di Desa Kaliwungu sehingga menghambat gerak laju pengentasan masyarakat miskin di desa ini, yang juga berarti memperlemah peran Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam memberdayakan masyarakat miskin. Peran ini relative lemah, karena pada kenyataannya dalam hal memberdayakan masyarakat miskin, Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo bayak tergantung pada mitra strategisnya. Posisi Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo semakin sulit, ketika pada kenyataannya mitra strategis yang ada tidak memahami posisi strategis kemitraan yang dibangun. Tiada pemahaman yang komprehensif pada mitra strategis tentang betapa strategisnya integrasi aliansi mitra strategis.
4.	Lina Triandaru (2009)	Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah.	Diskriptif Kualitatif	Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pada sub seksi pemberdayaan masyarakat di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, telah dilaksanakan dengan baik namun belum sempurna, karena masih ada kegiatan-kegiatan dari perencanaan yang belum dapat terealisasi.
5.	Ninik Indrawati (2010)	Pemberdayaan Masyarakat sebagai solusi keikutsertaan petani dalam program Sertifikasi Massal swadaya. (Studi di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah)	Diskriptif Kualitatif	<b>Rencana Hasil Penelitian:</b> Konsepsi Pemberdayaan Masyarakat yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo yang nantinya dapat berfungsi sebagai solusi bagi keikutsertaan petani dalam program SMS dilakukan melalui: - Sosialisasi - Penyuluhan dan - Pembinaan

Sumber. Pengolahan Skripsi STPN 2006-2010

Berdasarkan matrik tabel diatas jelas terlihat perbedaan antara penelitian satu dengan lainnya. Masing-masing peneliti membahas mengenai permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat terkait dengan adanya Sub Seksi



Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota serta penyelesaian dalam kegiatan Sertifikasi Massal Swadaya.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai konsepsi pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. Secara konseptual pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan. Sebagai wujud dari program pemberdayaan tersebut, diharapkan petani dapat berpartisipasi atau ikut serta pada kegiatan Sertifikasi Massal Swadaya.

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui konsepsi pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam program Sertifikasi Massal Swadaya di Desa Jombang Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat pada program Sertifikasi Massal swadaya di Desa Jombang Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo serta upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut.

## 2. Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Institusi

- 1). Bagi BPN-RI yaitu sebagai sumber informasi tentang sejauhmana peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam memberdayakan masyarakat pada program Sertifikasi Massal swadaya;
- 2). Sebagai masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat;
- 3). Bagi STPN berupa reservoir intelektual di bidang sosiologi pertanahan dan sekaligus pemicu pengembangannya di STPN khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

### b. Pribadi Penulis/ Peneliti

- 1). Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang pertanahan khususnya mengenai pemberdayaan masyarakat.
- 2). Sebagai syarat kelulusan dalam menempuh Program Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Konsepsi pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan upaya mengatasinya:

##### **a. Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo**

Anggaran DIPA terlalu kecil, untuk mengatasinya pihak Kantor Pertanahan melakukan koordinasi/kerjasama dengan pihak Desa untuk kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan khususnya menyangkut masalah biaya.

##### **b. Kantor Kecamatan Ngombol**

Tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di Kantor Kecamatan Ngombol.

##### **c. Kantor Desa Jombang**

Hambatan dalam hal kehadiran. Sebagian dari warga mempunyai tanah di Desa Jombang tetapi bertempat tinggal diluar kota/wilayah. Upaya untuk mengatasinya dengan

diwakili oleh anggota keluarga/saudara yang bertempat tinggal di Desa Jombang tersebut.

**d. Warga Masyarakat Desa Jombang**

Hambatan dalam hal kehadiran. Pelaksanaan penyuluhan pada hari dan jam kerja yang membuat sebagian warga yang berprofesi selain petani seperti PNS, Guru, dan lain-lain tidak dapat hadir dalam penyuluhan. Upaya mengatasinya dengan diberikan brosur dan , meminta izin kepada instansi masing-masing untuk ikut dalam kegiatan penyuluhan.

**B. SARAN**

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan terutama dalam sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan sehingga program kerja yang dicanangkan dapat berjalan lancar.
2. Badan Pertanahan Nasional pada pelaksanaan setiap kegiatan agar lebih profesional, proposional dan sistematis dalam hal anggaran. DIPA hendaknya diturunkan sesuai dengan program kerja masing-masing sehingga tugas pokok dan seksi dari Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat bisa teraplikasi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta Karya, Jakarta.
- Effendi, Perangin. 1990. *Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah*. CV. Rajawali, Bandung.
- Harsono, Boedi. 2003. *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Edisi Revisi 2003*. Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Boedi. 2004. *Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Boedi. 2003. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*. Yogyakarta
- Hartati, Tri. 2001. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Dalam Pensertipikatan Tanah Secara Massal Swadaya*. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Hendarto. 2008. *Peranan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo*. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Kasno, Azwir. 2003. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pensertipikatan Tanah*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta;
- Majalah SANDI Edisi XXIII. 2006. *Dasar pelaksanaan program Sertifikasi Massal Swadaya*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi 2007*. Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Muhajir, Noeng. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta, Rake Sarasin.
- Nugroho, Aristiono. 2006. *Teknik Pembuatan Proposal, Skripsi Dan Thesis, Empowerment Of Society Institute*. Yogyakarta.
- Nugroho, Aristiono, dan Abdul Haris Farid. 2008. *Sosiologi Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta*.
- Nugroho, Aristiono. 2006. *Ketika Individu Terintegrasi Dalam masyarakat*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Nugroho, Aristiono. 2007. *Panduan Singkat Penggunaan Metode Kuantitatif Dalam Penelitian*. Yogyakarta.
- Parlindungan, A.P. 1999. *Pendaftaran Tanah Pertama Di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Prayitno, Hadi dan Lincoln Arsyad. 1987. *Masalah Petani Gurem*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Prijono, Onny S. dan A.M.W. Pranaka. 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSIS, Jakarta.
- Sadhily, Hassan. 1989. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta.
- Sajogyo. 2006. *Ekososiologi, Deideologisasi Teori, Restrukturisasi Aksi (Petani dan Pedesaan Sebagai Kasus Uji)*. Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas (CPRS), Jakarta.
- Suherman, Herman. 2009. *Persepsi Masyarakat Dan Pemerintah Terhadap Okupasi Tanah Hak Guna Usaha (Hgu) Ptpn Viii Bunisari Lendra Di Kabupaten Garut*. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Supriadi. 2005. *Penyelesaian Sertipikasi Massal Swadaya di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*, Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Surakhmad, Winarno. 1998. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Tarsito, Bandung.
- Usman, Sunyoto. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

## INTERNET :

- BKKBN. 2009. *Profil Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2008*. Direktorat Pelaporan dan Statistik, Jakarta, <http://www.bkkbn.go.id.>, diakses tanggal 24 Februari 2010.
- Dewi Mayavanie Susanti. 2003. *Peranan Perempuan Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan*. <http://www.docstor.com.>, diakses tanggal 14 Februari 2010.
- Evy Juliantini. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan*. <http://www.pemberdayaan.com>, diakses tanggal 09 Februari 2010.
- Kemiskinan menurut bps. <http://www.bps.co.id.>, diakses tanggal 24 Februari 2010.
- Mohamad Aqil Irham. 2009. *Konsep Pemberdayaan Agar Bisa Membantu Masyarakat Menolong Diri Sendiri*. <http://www.pemberdayaan.com>, diakses tanggal 14 Februari 2010.
- Sutoro Eko. 2007. *Titik fokus Konsep Pemberdayaan*. <http://www.pemberdayaan.com>, diakses tanggal 24 februari 2010
- Wayan Suarja. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat Petani*. <http://www.fb.brawijaya.ac.id/academic/pdf/13-7.makalah>, diakses tanggal 14 Februari 2010.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

### UNDANG-UNDANG

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, UU Nomor 5 Tahun 1960.

### PERATURAN PEMERINTAH

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah* , PP Nomor 24 Tahun 1997.

### PERATURAN MENTERI

Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah*, PMNA/ KBPN Nomor 3 Tahun 1997.

### PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Indonesia, *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota* , Peraturan KBPN No.4 Tahun 2006.